

BAB III
PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DI MAJALAYA
TAHUN 1920-1970

3.1 Perkembangan Industri Tekstil Periode 1920-1935

Industri tekstil di Majalaya mengalami fluktuatif selama tahun 1920-1970. Industri tekstil di Majalaya ini berawal dari adanya permintaan Kepala Dinas Pertanian, Industri Kecil dan Perdagangan untuk membentuk sekolah tekstil pada tahun 1920 yang kemudian berhasil didirikan pada tahun 1921 sebagai upaya dari pemerintahan Hindia-Belanda untuk memajukan industri dalam negeri⁵⁹. Sekolah tekstil tersebut bernama Textiel Inrichting Bandung yang didirikan di Bandung. Textile Inrichting Bandung menjadi sekolah pertama yang mengenalkan industri tekstil ke masyarakat, sekolah ini dijadikan sebagai lembaga untuk mempelajari serta meningkatkan teknik menenun, mewarnai, desain dan pola kain. Sekolah ini juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan pedesaan dengan mengenalkan dan menyebarkan teknologi⁶⁰ dan seiring berjalannya waktu bukan lagi mengenal melainkan sudah mulai masuk dalam kegiatan sehari-hari, bahkan ditahun 1930 masyarakat Majalaya sudah menjadikan kegiatan industri tekstil menjadi kegiatan sampingan sebagai pengisi waktu luang selain pekerjaan utamanya yaitu pertanian. Tahun 1927 sekolah Textiel Inrichting Bandung mengadakan demonstrasi dalam sebuah pameran di Majalaya untuk memperkenalkan alat tenun di sekolah tersebut

⁵⁹ P.J. Keppy, *Hidden Business: Indigenous And Ethnic Chinese Entrepreneurs In The Majalaya Textile Industry, West Java, 1928-1974*. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2001, Page. 36; Pierre Van Der Eng, "Why Didn't Colonial Indonesia Have A Competitive Cotton Textile Industry?," *Modern Asian Studies* 47, No. 3 (2013): 1019–1054. Page. 1044.

⁶⁰ Van Der Eng, *op.cit.* page. 1044.

yang dinamakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan segala bentuk kegiatan lainnya, demonstrasi yang diadakan disekolah tersebut diikuti oleh beberapa juragan⁶¹ dari Majalaya, juragan tersebut memiliki ketertarikan terhadap tenun dan ditahun berikutnya yaitu pada tahun 1928 juragan-juragan yang berasal dari Majalaya mengirimkan anaknya ke TIB untuk belajar menenun. Anak-anak juragan itu diantaranya adalah Nyi Emas, Nyi Enda Suhaenda, Nyi Oya Rohana, Nyi Ici yang semuanya adalah perempuan⁶². Keempat perempuan itu lah yang kemudian menjadi pelopor dari tenun yang ada di wilayah Majalaya, mereka pergi ke TIB untuk belajar menenun dan kembali ke Majalaya untuk mempraktekan hasil belajarnya.

Tahun 1928 yaitu ditahun yang sama dengan dikirimnya anak-anak juragan untuk sekolah ke TIB, banyak etnis Tionghoa yang menentap di kota dan kabupaten seperti Cicalengka dan Majalaya. Etnis Tionghoa yang masuk ke Majalaya diantaranya adalah suku Hakka, Hokkien, Kongfu dan Hokchia yang diantaranya mempengaruhi terhadap perkembangan industri tekstil di Majalaya⁶³. Perkembangan industri tekstil di Majalaya ini mendapatkan momentumnya ditahun 1930 yaitu pada saat depresi ekonomi dunia yang menghantam perekonomian Jawa termasuk Majalaya dan bagian Indonesia lainnya yang menyebabkan runtuhnya pertanian komersial, banyak dari pengusaha menutup perusahaan perkebunan dan mengurangi skala operasi dan ini terjadi di Majalaya

⁶¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juragan adalah pemilik perusahaan atau sebutan orang upahan terhadap majikan; tuan; nyonya.

⁶² Keppy, *loc.cit*; J. Hardjono, *op.cit.*, Page. 3.

⁶³ *Ibid.*

sehingga mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan lain diluar pertanian⁶⁴.

Perkembangan ini juga ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik tekstil pribumi. Pertengahan tahun 1930, banyak dari para petani yang berpindah menjadi buruh tenun kemudian akhirnya mulai merintis usaha tenun rumahan⁶⁵. Para pengusaha tenun ini terbagi menjadi dua sebagian bekerja secara mandiri, yaitu mencari dan membeli bahan baku, memproduksi, dan memasarkan produknya sendiri, sedangkan sebagian lagi dengan cara *putting out system* yang berada dibawah agen dan agen ini sebagian besar berasal dari orang-orang Tionghoa⁶⁶. Ciri pemulihan yang paling luar biasa setelah adanya depresi dunia ini adalah pertumbuhan hasil industri diakhir tahun 1930⁶⁷ apalagi industri manufaktur yang tidak terlalu terpengaruh oleh depresi ekonomi.

Tahun 1931 setelah tenun mendapatkan momentumnya untuk berkembang di Majalaya dan banyak dari buruh tenun memulai usahanya, di sisi lain krisis keuangan dunia yang menghantam perekonomian Hindia-Belanda membuat Hindia-Belanda kehilangan pangsa pasar di Asia terutama Indonesia karena kalah oleh impor Jepang sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi di Indonesia maka Belanda melakukan tindakan protektif yaitu menerapkan strategi sistem kuota yang ditujukan untuk Jepang pada tahun 1933. Kenichi Goto juga mengatakan bahwa di Bandung banyak toko-toko Jepang yang berdiri sehingga

⁶⁴ Nawiyanto, *Matahari Terbit Dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina*. Yogyakarta: penerbit ombak, 2010, hlm. 48-49.

⁶⁵ Setia, *op.cit.*, hlm 30.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Booth, *op.cit.*, page. 41.

area tersebut mirip seperti kota Jepang⁶⁸ dan ditahun 1934 Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pendapatan setiap kelompok juga mulai meningkat⁶⁹. Pertumbuhan ekonomi ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan dan produksi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pertumbuhan produksi dan salah satu faktor produksi menurut Ibnu Khaldun adalah tenaga kerja. Belanda juga disisi lain khawatir jika Jepang membangun pabrik di Indonesia maka pada tahun 1935 untuk mengantisipasi hal tersebut Belanda membuat peraturan baru yaitu membatasi perusahaan dan kapasitas produksi dalam negeri. Salah satu alasan mengapa industri ataupun lapangan kerja tumbuh pesat selama akhir tahun 1930-an adalah karena adanya perubahan kebijakan pemerintahan dalam membangun industri sebagai akibat dari dampak depresi ekonomi yang dikuasai oleh asing⁷⁰.

3.2 Perkembangan Industri Tekstil Periode 1936-1949

Majalaya merupakan salah satu kota industri tekstil yang terkenal pada masa Hindia-Belanda dan salah satu produk tekstil yang terkenal pada masanya adalah kain Poleng, terutama sarung katun sutera yang memiliki kualitas tinggi. Kain Poleng yang terkenal perlahan mengambil alih posisi sarung batik di pantai utara Jawa yang pada masanya sedang populer, dan hal tersebut bisa terlihat di Cirebon. Haji Shamsuedin merupakan salah satu pengusaha terkenal dan ternama di Cirebon, yang pada tahun 1935 harus memesan kain Poleng ke Majalaya untuk memenuhi permintaan di Cirebon, karena adanya perubahan mode penduduk laki-

⁶⁸ Nawiyanto, *op.cit.*, hlm. 58.

⁶⁹ Booth, *loc.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*,page. 43.

laki dipantai Utara Jawa dan Jawa Timur, sehingga hal tersebut membuat posisi Majalaya semakin kuat dipasar sarung.

Pasar sarung Majalaya yang berhasil merebut gerai diluar Jawa adalah gerai milik haji Abdoelgani yaitu salah satu pemilik perusahaan yang bernama saudara Oesaha di Majalaya, pabrik itulah yang kemudian mendapat pujian dari gubernur jendral Hindia-Belanda yaitu A.W.L. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer yang didampingi oleh Bupati Bandung yaitu R.A.A. Wiranatakoesoemah V dan dari situ menurut Adang Darsana banyak industri tenun rumahan yang bermunculan⁷¹. Abdoelgani mengatakan pada tahun 1936, bahwa desain sarung itu terus mengalami perubahan, sehingga desain yang dibuat harus bisa memenuhi selera pasar, untuk selera orang sunda ia masih bisa memenuhi apa yang mereka suka karena sama-sama berasal dari orang sunda tetapi untuk orang Jawa Abdoelgani memiliki kesulitan untuk menemukan apa yang mereka suka⁷². Industri tenun pada tahun 1936 menjanjikan prospek yang bagus karena, harga sarung pada saat itu mengalami kenaikan sedangkan biaya produksi mengalami penurunan yang menyebabkan tingginya keuntungan yang didapat, sehingga dari adanya hal tersebut banyak orang yang berpindah ke tenun sebagai pekerjaan sampingan mereka, tak jarang juga banyak dari mereka yang menjadikan tenun sebagai pekerjaan utama.

Pekerja tenun yang mulai bermunculan ditahun 1936 membentuk kelompok baru dimasyarakat yang disebut sebagai pendatang. Pendatang ini berbeda dengan

⁷¹ Sungkawa, *op.cit.* hlm. 32.

⁷² Keppy, *op.cit.*, Page 53

pioneer atau pelopor industri tekstil karena sebagai pendatang mereka tidak memiliki keahlian seperti yang dimiliki oleh *pioneer*, mereka juga tidak memiliki latar belakang komersial seperti yang dimiliki oleh *pioneer*. Pekerja tenun yang banyak akhirnya didukung oleh Permintaan sarung Majalaya yang mendapat puncaknya yaitu pada tahun 1937 tepatnya di daerah penghasil karet yaitu Jambi dan Medan di Sumatera, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Barat, dan hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan produksi karet dan kenaikan harga karet diluar daerah yang disebut dengan ledakan karet, sehingga pendapatan produsen karet meningkat di Kalimantan dan Sumatera dan akhirnya meningkatkan permintaan sarung di Majalaya.

Ledakan karet yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera memberi dampak pada posisi Majalaya dipasar sarung, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan untuk industri tenun, kebijakan tersebut adalah pertama, karena kepadatan penduduk dan adanya pengangguran maka pemerintahan kolonial Belanda menjadikan pulau Jawa sebagai pusat industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, mengembangkan struktur industri untuk menyerap tenaga kerja sepenuhnya. Ketiga, menyediakan kredit dan segala bentuk informasi mengenai teknis dan produk industri kepada calon industrialis⁷³.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebelum adanya kebijakan mengenai industri tenun adalah kebijakan mengenai peraturan perusahaan yang ikut memberikan pengaruh pada kegiatan industri di Majalaya. Peraturan perusahaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1935

⁷³ *Ibid.*, Page 54

yaitu suatu tindakan untuk melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap produksi industri tekstil melalui perizinan alat tenun dan pendaftaran alat tenun, dengan ketentuan bahwa pabrik yang kurang dari 14 alat tenun dibebaskan dari pajak dan setiap pengusaha yang ingin memperluas perusahaannya dengan menambah alat tenun dan pengusaha yang ingin memulai usaha dengan mendirikan pabrik maka diperlukan izin dari departemen urusan ekonomi⁷⁴. Peraturan perusahaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan dan kelebihan produksi sarung, untuk melindungi Hindia-Belanda dari perusahaan Jepang yang ingin mendirikan unit produksi di Hindia-Belanda, untuk melindungi pangsa impor tekstil Belanda dari pengusaha tekstil pribumi dan Tionghoa⁷⁵.

Peraturan perusahaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial menuai pro kontra dari para pengusaha yang memiliki lebih dari 14 alat tenun dan para pengusaha pribumi, untuk sebagian pengusaha mereka merasa dirugikan karena dikenakan pajak tapi bagi sebagian pengusaha mereka merasa diuntungkan, berbeda dengan industrialis-pedagang Cina yang alih-alih untuk menghindari peraturan perusahaan tersebut mereka mendirikan pabrik yang masing-masing terdiri dari 14 alat tenun. Departemen urusan ekonomi melihat banyaknya fenomena yang terjadi yaitu banyak dari para pengusaha yang mendirikan perusahaan dengan 14 alat tenun untuk menghindari peraturan perusahaan dan hal itu tidak berpengaruh pada tujuan yang ingin dicapai oleh Departemen urusan ekonomi, maka dari itu pada tahun 1937 Departemen urusan ekonomi mengubah

⁷⁴ *Ibid.*, page. 65.

⁷⁵ *Ibid.*, page. 66.

Peraturan Perusahaan yaitu dengan menetapkan bahwa perusahaan yang bebas dari pajak adalah perusahaan yang memiliki 5 alat tenun dan hal itu juga tidak mengurangi ekspansi alat tenun dan masih banyak pabrik yang mengoperasikan kurang dari 5 alat tenun dan hal itu tentunya memecah industri. Peraturan perusahaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial alih alih untuk membatasi produksi, perizinan dan pajak ternyata banyak penyelewengan yang terjadi khususnya di Majalaya, banyak kasus penyelundupan kain sarung di Majalaya dengan kondisi kain sarung tanpa pita pendapatan sebagai tanda sudah membayar pajak.

Perkembangan industri tekstil pada tahun 1937 merupakan fase baru bagi industri tekstil Majalaya karena listrik mulai masuk ke Majalaya dan hal ini memungkinkan untuk Alat Tenun Mesin (ATM) beroperasi⁷⁶. Industri yang mengalami perkembangan pesat pada tahun 1937 di Jawa Barat, khususnya priangan termasuk Majalaya adalah industri sarung dan berhasil menguasai 47% keseluruhan suplai sarung⁷⁷. Perkembangan industri tekstil Majalaya juga diwarnai dengan adanya Jepang sebagai negara pengimpor benang kapas terbesar karena produksi kapas dalam negeri tidak memenuhi secara kualitas dan kuantitas, dan ditahun 1938 Jepang mengambil 4 ton dari 6 ton keseluruhan impor benang katun⁷⁸.

Bisnis impor yang terjadi mempersulit pasokan benang untuk perusahaan skala kecil karena setengah dari harga benang harus dibayar dimuka dan hal itu

⁷⁶ Hardjono, *op.cit.*, page. 4.

⁷⁷ Setia, *op.cit.*, hlm. 35.

⁷⁸ Keppy, *Op.cit.*, page. 72.

tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha skala kecil, sedangkan untuk pengusaha skala besar hal itu tidak menjadi masalah, apalagi ditambah dengan kebijakan departemen urusan ekonomi yang menghentikan pasokan benang di TIB yang berasal dari Belanda dan Jepang pada tahun 1935, membuat pengusaha skala kecil dan sebagian besar penenun kekuarangan pasokan benang tenun, tetapi dengan adanya kontraktor sebagai klien baru dari rumah ekspor-impor yang kemudian menyalurkan benang kepada subkontraktor, yang pada akhirnya di awal tahun 1940 hubungan subkontrak ini mampu menyelesaikan permasalahan mengenai kekosongan pasokan benang.

Tahun 1939 perang di Eropa pecah sehingga menyebabkan terhentinya pelayaran dari Eropa ke Hindia-Belanda. Ekspor dari Eropa juga hampir terhenti setelah Jerman menduduki Belanda tahun 1940, dan ditahun yang sama banyak pendatang baru dalam industri tenun skala kecil di Majalaya, tetapi industri tekstil yang tadinya memproduksi sarung kini sedikit demi sedikit beralih ke produksi non-sarung, selain itu posisi Jepang juga diperkuat dengan situasi impor benang dari Eropa yang dihentikan ke Hindia-Belanda, tetapi posisi Jepang yang kuat tetap tidak bisa mengimbangi permintaan benang di Hindia-Belanda dan hal ini kembali menyebabkan krisis benang tenun di Hindia-Belanda terutama di Majalaya.

Krisis benang tenun sebagai bahan baku dari industri tekstil tenun membuat para penenun di Majalaya untuk bisa menjalin kerjasama antar pengusaha tekstil pribumi. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah pertemuan yang selenggarakan pada bulan februari 1940 oleh sekelompok penenun pribumi Majalaya yang dinamakan dengan Persatuan Kaum Tenun (perkat). Kerjasama yang dilakukan

oleh para penenun pribumi adalah bentuk dari bangkitnya rasa nasionalisme Indonesia. Perkat sendiri didirikan untuk menghimpun modal yang nantinya akan digunakan untuk membeli benang tenun dan bahan pewarna, selain itu Perkat juga didirikan untuk menghentikan orang-orang Tionghoa di Majalaya yang ingin mendirikan pabrik tenun. Krisis yang terjadi di Hindia-Belanda terutama di Majalaya bukan lah satu satunya dampak yang dihasilkan dari penghentian impor akibat adanya perang, tetapi permintaan Jepang pada tahun 1941 yang memaksa Belanda untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya di Hindia-Belanda mengenai industrialisasinya juga merupakan dampak dari pendudukan Belanda oleh Jerman setelah adanya perang Eropa dan dengan kondisi tersebut departemen perekonomian mengambil sikap yang kurang tegas dan lunak sampai akhirnya peraturan perusahaan yang sebelumnya telah diterapkan, dihentikan bulan Desember tahun 1941⁷⁹.

Tahun 1942 Jepang melakukan invasi yang tak terduga sebagai reaksi dari adanya tindakan Hindia-Belanda yang menghentikan ekspor ke Jepang, dan hal itu dilakukan oleh Hindia-Belanda bukan tanpa alasan melainkan sebagai protes atas pendudukan Jepang terhadap Indo-Cina pada tahun 1940, dan pada gilirannya ditahun 1941 bulan Agustus Jepang menghentikan ekspor ke Hindia-Belanda. Perselisihan antara Hindia-Belanda dan Jepang ini mulai terlihat secara jelas pada bulan September tahun 1941 sampai akhirnya Hindia-Belanda menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941 dan di bulan Maret Jepang mendarat di Jawa dengan mendapat perlawanan dari Belanda, sampai akhirnya

⁷⁹ *Ibid.*, page. 78.

pada tanggal 7 Maret 1942 Jepang berhasil merebut Bandung dari tangan Belanda dan untuk keesokan harinya Belanda menyerah terhadap Jepang.

Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan, kekuasaannya mengantarkan pada sebuah perubahan yaitu mengubah sistem pemerintahan tidak langsung dari Belanda menjadi pemerintahan langsung Jepang. Perubahan itu bisa tercermin dari tindakan Jepang yang menahan semua orang yang kontra dengannya. Jepang juga tidak hanya mengubah sistem pemerintahan melainkan mengubah sistem ekonomi dari liberal menjadi ekonomi terkendali.

Jepang sebelum menduduki Hindia-Belanda secara resmi pada tahun 1942 telah membuat perekonomian Majalaya sangat buruk dan mengkhawatirkan, seperti yang dikatakan oleh Hardon, ia memperkirakan bahwa industri tekstil hanya beroperasi 20 persen dari kapasitasnya pada tahun 1942, ia juga menyebutkan bahwa 80 persen pabrik telah rusak di Majalaya yang menjadi pusat industri di Jawa Barat⁸⁰. Pada tahun 1941 dengan dihentikannya ekspor benang tenun dari Jepang membuat industri Majalaya lumpuh. Jepang setelah menguasai Hindia-Belanda menangani krisis benang tenun di Majalaya yaitu dengan menyita stok benang yang ada dan tidak hanya itu tetapi Jepang juga mendirikan Badan Peraturan Perusahaan Tenun Kabupaten Bandung untuk mengawasi industri tenun dengan mengeluarkan ketentuan bahwa penenun yang memiliki alat tenun dibawah 4 maka bebas dalam berproduksi, tetapi untuk penenun yang memiliki 3-4 alat tenun mereka ditugaskan untuk memproduksi Poplin dan kain setengah Sutura dan hanya diizinkan untuk memproduksi 50 persen dari total produksi biasanya.

⁸⁰ Booth, *op.cit.*, page. 52.

Badan Penerangan Tenun atau Badan Informasi Tenun milik pribumi disisi lain melakukan eksperimen dengan memproduksi kain pemakaman dan karung goni yang terbuat dari goni dan rami, sampai akhirnya April 1943 Majalaya dikabarkan bangkit dengan industri tenunnya oleh Majalah propaganda besar Jepang di Indonesia, tetapi kebangkitan itu bukan dari produksi kain katun melainkan karung goni dan kain kafan yang terbuat dari kombinasi sisal dan serat Staple atau Serat buatan dan hal ini terjadi karena benang yang disita hanya diproduksi oleh pabrik besar dan diperuntukan oleh tenara dan Angkatan laut Jepang⁸¹. Produksi tekstil di Majalaya lagi-lagi terganggu oleh kebijakan Jepang yang sebelumnya dikarenakan oleh krisis benang tenun, maka ditahun 1944 Jepang memerintahkan untuk pengapalan 500 alat tenun yang ada di Indonesia ke Malaya, Burma dan daerah lain yang ada di Asia Tenggara, dengan adanya kebijakan tersebut banyak dari para penenun yang menyembunyikan alat tenun mereka ke daerah pegunungan.

Kebijakan Jepang tersebut didasarkan atas adanya serangan dari sekutu dan posisi militer Jepang juga sedang memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia terutama para pemimpin Nasionalis sampai akhirnya 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Komite Nasional Indonesia memberi perintah untuk membentuk sebuah badan dengan maksud untuk melindungi dan mewakili Republik Indonesia di Priangan, serta untuk mempersiapkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Badan yang

⁸¹ Keppy, *op.cit.*, page. 90.

dimaksud adalah Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia.

TNI sendiri membagi priangan kedalam beberapa wilayah yang termasuk Majalaya, di Majalaya sendiri Badan Perjuangan Republik Indonesia adalah Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Mohamad Rivai. Mohamad Rivai sendiri memainkan peran pentingnya dalam bidang politik sekaligus sebagai pengusaha tekstil di Majalaya. BPRI pada tanggal 12 Oktober 1945 dimasukan kedalam Divisi Siliwangi TNI yang kemudian berubah menjadi batalyon 32/ Garuda Hitam. Garuda Hitam inilah yang kemudian akan berperan penting dalam pertahanan Indonesia ketika datangnya Inggris ke Priangan.

12 Oktober 1945 Inggris datang ke Priangan tepatnya di Bandung untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, melihat kondisi seperti itu pemuda pribumi segera megambil tindakan untuk melakukan serangan dengan taktik bumi hangus yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Serangan yang dilakukan oleh pemuda pribumi terjadi pada bulan Mei 1946. Serangan tersebut dilakukan selain karena kedatangan Inggris tetapi juga sebagai reaksi dari adanya ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu yang menyebutkan bahwa semua pasukan Republik harus meninggalkan Ibu Kota Priangan dan ultimatum yang dikeluarkan menyebabkan arus besar penduduk berpindah dari Bandung ke Majalaya.

Arus besar yang terjadi dari Bandung ke Majalaya serta adanya bom yang dijatuhkan oleh belanda pada bulan Juni 1946 mengharuskan masyarakat Majalaya untuk ikut mencari perlindungan. Masyarakat Majalaya mencari perlindungan ke

arah pegunungan⁸². Tahun 1946 yaitu ditahun yang sama Belanda mengeluarkan kebijakan ekonomi baru dengan tujuan untuk merekonstruksi industri terutama industri tekstil, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Belanda yaitu menguasai sektor ekonomi yang vital, bekerja sama dengan organisasi ekspor-impor yang didirikan oleh departemen urusan ekonomi, mendirikan kembali organisasi impor umum, mendirikan kembali yayasan dana untuk industri skala kecil⁸³.

Belanda dalam melaksanakan rencananya untuk merekonstruksi industri mengalami hambatan yaitu kondisi politik dan militer yang ada sedang tidak aman dan disamping itu industri juga memiliki masalah yang belum terselesaikan yaitu krisis benang tenun yang dialaminya sejak zaman Jepang menduduki Priangan dan krisis benang tenun ini bisa terlihat dari harga benang yang naik dua kali lipat dari harga normalnya sehingga dari keadaan tersebut banyak benang yang diimpor secara illegal. Industri tekstil yang ada di Majalaya selain menghadapi beberapa masalah mengenai benang tenun tetapi ditambah dengan operasi militer dan peristiwa Bandung Lautan Api menyebabkan industri tekstil tertekan, karena tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa Bandung Lautan Api telah menyebabkan kerusakan yang parah di Majalaya.

Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi ditahun 1946 disusul dengan aksi militer pertama belanda yaitu pada bulan Juli 1947, walaupun sebelumnya yaitu di awal tahun 1947 kondisi mulai relatif aman dan damai tetapi memang tidak bertahan lama. Aksi militer pertama Belanda pada bulan Juli 1947 menjadikan

⁸² Setia, *op.cit.*, hlm. 46.

⁸³ Keppy, *op.cit.* page. 106-107

Majalaya sebagai medan pertempuran, sampai akhirnya tanggal 22 Juli 1947 Majalaya berhasil direbut oleh kekuasaan Belanda dan karena itulah aksi militer yang terjadi tahun 1947 juga ikut mempengaruhi kondisi industri di Majalaya karena aksi militer yang terjadi telah menyebabkan kehancuran alat tenun dan krisis ekonomi. Terlepas dari pertengkaran antara Belanda dan republik, disisi lain ada darul islam yang muncul ke permukaan dan memproklamasikan diri pada tanggal 7 Agustus 1949 dan yang tak bisa dipungkiri adalah operasi gerilya yang dilakukan DI juga ikut mengganggu produksi tekstil di Majalaya hingga tahun 1950. Aksi militer yang membuat kondisi industri menjadi tidak baik-baik saja ternyata masih meninggalkan dampak positif yaitu semakin banyaknya orang yang ikut terlibat ke dalam dunia industri dan tercatat bahwa sebanyak 400 alat tenun berproduksi sarung di Majalaya dan di bulan Maret 1948 majalaya berhasil menenun dengan modal sendiri sampai akhirnya menjelang akhir tahun 1949 para pengusaha pribumi dapat di bedakan menjadi dua kategori yaitu pengusaha yang memiliki 1 sampai 4 alat tenun dan 5 sampai 15 alat tenun⁸⁴.

Rekonstruksi industri di Majalaya bukan hanya dilakukan oleh pihak belanda tetapi juga dilakukan oleh para industrialis pribumi yaitu dengan membentuk organisasi yang bernama Gaperti yang didirikan pada tahun 1949 dan NV Rumbia yang bertujuan untuk memperkuat industri khususnya tekstil di Majalaya.

3.3 Perkembangan Industri Tekstil Periode 1950-1970

Industri tekstil di Indonesia khususnya di Majalaya yang secara tidak resmi di anggap sebagai anak kesayangan dari pemerintah, karena menjadi pusat

⁸⁴ *Ibid.*, page. 109.

produksi terpenting dalam industri tenun. Industri tenun di Majalaya banyak dipengaruhi oleh keadaan politik di Indonesia apalagi di rentang tahun 1950-1957. Negara Pasundan dibubarkan pada 1 Maret 1950 dan dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dan pada tanggal 17 Maret 1950 sewaktu dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pertama dan ini menjadi sebuah tanda dari berakhirnya keterlibatan pemerintahan Belanda dalam industri tekstil di lima tahun kebelakang,

Pemerintahan Belanda telah berakhir dalam keterlibatannya di industri tekstil Jawa Barat tetapi, hal itu tidak menghentikan pengaruhnya didalam industri karena kebijakan yang diterapkan untuk industri sebagian besar disalin dari kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya. Pemerintahan kolonial Belanda diganti menjadi pemerintah Republik Indonesia dan perpindahan kekuasaan sedikit banyak memunculkan ketidak pastian politik. Ketidak pastian politik ini memberikan pengaruh pada kepemilikan industri tenun di Majalaya dan bisa terlihat bahwa di rentang bulan Februari sampai maret 1950 jumlah alat tenun yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa adalah 3.837 menjadi 2.885 sedangkan dibulan April sampai Mei jumlah alat tenun yang dimiliki 2.885 menjadi 6.651, sedangkan direntang bulan Februari sampai Maret 1950, 100 pabrik yang dimiliki oleh rakyat pribumi tutup dan dijual kepada Etnis Tionghoa, terlepas dari ketidak pastian politik yang berpengaruh pada kondisi industri tekstil, yang menjadi masalah besar adalah pasokan benang tenun yang tidak stabil.

November 1950 diadakan konferensi tekstil berskala nasional yang diadakan di Bandung. Konferensi itu menghasilkan keputusan bahwa impor tekstil baik legal ataupun illegal akan tetap berpengaruh pada industri dalam negeri, yang akhirnya

akan menciptakan persaingan sehingga, dari sini pemerintah didesak untuk membatasi atau bahkan menghentikan impor kain sarung, sampai akhirnya di bulan Februari 1951 kementerian perdagangan melakukan pembatasan impor, tetapi pada saat terjadinya perang korea ditahun 1951 Indonesia mendapatkan kelegaan bagi posisi devisa yang mana memberikan ruang finansial untuk mengimpor benang tenun, tetapi walaupun begitu secara keseluruhan posisi pasar benang tenun tetap tidak stabil dan tidak teratur yang menyebabkan fluktuasi harga.

Pemerintah Indonesia menanggapi kondisi pasar benang tenun yang tidak stabil pada bulan Mei 1954 yaitu dengan melakukan alokasi benang tenun yang artinya, posisi benang dalam industri menjadi barang yang dikendalikan oleh pemerintah, dengan tujuan yaitu untuk menstabilkan harga benang atau menurunkannya melalui kontrol dan subsidi dari pemerintah dan dengan adanya alokasi benang tenun pabrik skala kecil harus mendaftarkan pabriknya ke departemen perindustrian untuk mendapatkan benang yang kemudian akan disuplai oleh Koperasi⁸⁵. Alokasi benang yang dilakukan oleh pemerintah alih-alih untuk memecahkan masalah tetapi justru malah menciptakan masalah baru yaitu adanya pasar gelap untuk benang tenun serta banyaknya penyelundup benang dan bantuan yang tidak sampai pada penerimanya⁸⁶. Selain itu, September 1952 pejabat departemen perindustrian telah memperkirakan bahwa di Kabupaten Bandung, Ciparay, Majalaya, dan Cicalengka terdapat 10.000 alat tenun gelap yang beroperasi, khawatir akan menjadi persaingan yang menyebabkan harga tekstil turun maka

⁸⁵ Wawancara dengan Didi Restiandi, wiraswasta, 13 Juni 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Didi Restiandi, wiraswasta, 13 Juni 2023.

diadakanlah pertemuan oleh Departemen Perindustrian pada bulan yang sama yaitu September 1952 yang diikuti oleh para pengusaha untuk membahas masalah yang terjadi tetapi, justru tidak ada hasil, maka di bulan Februari tahun 1953 Departemen Perindustrian mengambil tindakan untuk menyelidiki hal tersebut yaitu dengan cara mengeluarkan sistem izin tenun yang mana setiap alat tenun dikenakan pajak 3 rupiah dan ditandai dengan izin merek⁸⁷.

Industri tenun tersembunyi ini banyak dikarenakan oleh tiga hal yaitu pertama, kontraktor baik itu pedagang benang ataupun industrialis masih menggunakan hubungan subkontrak untuk menghindari undang-undang perburuhan. Kedua, sistem alokasi benang tenun yang dikendalikan oleh pemerintah banyak memunculkan penyelundupan benang, ketiga, ketentuan pemerintah tahun 1954 yang menyatakan bahwa pengusaha asing tidak boleh mengembangkan kapasitas tenun⁸⁸. Tahun 1956 dan di akhir tahun 1957 sebagian pengusaha tekstil pribumi dan Cina di Majalaya menunjukkan sikap filantropis yang mencolok dan kondisi pasar benang tenun dan industri tenun menunjukkan tanda tanda krisis karena adanya sistem kawin yang dikenalkan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1957 memperkenalkan sekaligus menerapkan sistem kawin yang memberikan dampak diawal tahun 1958 yaitu, krisis benang tenun yang terus berkembang. Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1958 melakukan kontrol ketat terhadap harga bahan mentah yang disebabkan oleh penimbunan dan kenaikan harga dari adanya sistem alokasi

⁸⁷ Keppy, *op.cit.*, page. 155; Wawancara dengan Ejang, Mantan pekerja tekstil, 13 Juni 2023.

⁸⁸ *Ibid.*, page. 155-156.

benang, kontrol ketat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pembatasan impor benang tenun tetapi tak lama dari sana diakhir tahun 1958 sistem alokasi yang dikenalkan oleh pemerinahan menunjukan kelemahannya secara jelas sedangkan, untuk masalah yang ditimbulkan bisa terlihat pada akhir September 1959 yaitu dengan adanya masalah likuiditas dan tentunya masalah ini sangat berpengaruh terhadap makloon yang ada di Majalaya.

Sistem alokasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah memperlambat kredit yang diberikan kepada penenun dan pasokan benang juga seringkali ditunda yang menyebabkan sistem makloon di Majalaya ini ikut terpengaruhi oleh adanya sistem alokasi benang, dan hal itu bisa terlihat dari adanya penghentian 68 pabrik dalam berproduksi serta menurunkan upah pekerjanya. Penenun Majalaya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi bukan menghubungi departemen perindustrian melainkan makelar karena dari masalah yang terjadi makelar bisa menjadi solusi untuk menangani keterlambatan kredit dan pasokan benang, walaupun untuk masalah impor makelar tidak bisa menyelesaikannya karena berkaitan dengan devisa.

Makelar yang pada tahun 1959 menjadi solusi ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 yang dikenalkan pada bulan Mei 1959 yaitu, mengurangi kegiatan komersial orang-orang Tionghoa dan hal itu memberikan peluang bagi para makelar. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah, pemerintah juga pada bulan April 1961 melegalkan semua usaha tenun haram untuk menyediakan kebutuhan pokok tenun, tetapi ternyata semua itu sia-sia dan hal itu terlihat ditahun 1962 sehingga pada awal tahun 1963 pemerintah melakukan

operasi untuk melawan bisnis terlarang yang sudah dilegalkan sebelumnya dan dibentuklah tim Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Tim Kotoe tersebut dalam peneyelidikannya ternyata menemukan bahwa Majalaya selain menjadi pusat utama produksi tekstil Indonesia tetapi Majalaya juga menjadi pusat utama manipulasi benang. Tim Kotoe setelah melakukan tugas akhirnya dibubarkan pada bulan September 1965 dan diserap kedalam Badan Eksekutif Industri Tekstil Nasional (Balaksanas).

Orde baru pada masa Jendral Soeharto didirikan pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1975 merupakan tanda bagi proses penurunan partisipasi pribumi dalam industri tenun Majalaya serta perubahan yang terjadi antar pengusaha Majalaya dan negara, perpindahan kekuasaan ini menandakan bahwa bangsa asing terutama Tionghoa berhak mendirikan pabrik dan Alat Tenun Mesin mulai banyak dimana-mana, hal inilah yang kemudian bangsa pribumi yang masih menggunakan alat Tenun Bukan Mesin semakin terpinggirkan⁸⁹. Majalaya merupakan salah satu kota yang menerapkan Keputusan Presiden no. 11 tahun 1963 yaitu peraturan yang meminta para pengusaha tekstil untuk membersihkan diri dan toko dari segala hal yang terlibat dengan Gerakan 30 September. Sekolah Tionghoa di Bandung ditutup pada tahun 1966, tetapi pada tahun 1967 pengawasan militer dan kegiatan politik di Majalaya berkurang karena semua mata teruju pada masalah produksi dan likuiditas.

Majalaya dan Bandung diakhir tahun 1965 menjadi salah satu kota yang terdampak dari adanya masalah mata uang asing yang mengharuskan produksi

⁸⁹ Wawancara dengan Didi Restiandi dan Ejang, wiraswasta 13 Juni 2023.

tekstil di Bandung dan Majalaya terhenti karena dengan adanya masalah mata uang asing, impor benang tenun secara tidak langsung terbatas apalagi diperparah dengan situasi politik yang belum jelas. Benang tenun pada tahun 1965 hanya diimpor dari Republik rakyat Cina (RRC) dan sebagai tambahan dari amerika serikat yaitu pada tahun 1966 dan 1967. Impor benang dari RRC ini mulai terganggu sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, sehingga mengharuskan Indonesia untuk merehabilitasi industri tekstilnya. Gerakan 30 September tidak hanya mengganggu impor benang tetapi juga produksi pabrik-pabrik milik pribumi yaitu salah satunya pabrik milik Pak Didi, karena dengan adanya G 30 S PKI barang yang sudah diproduksi tidak bisa dijual ke luar wilayah dan hanya menjual diwilayah sekitar saja⁹⁰. Selain itu, produksi tekstil juga terganggu dengan adanya devaluasi rupiah, dengan adanya devaluasi rupiah pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menstabilkan ekonomi yaitu dengan mengeluarkan peraturan 3 Oktober 1966 yang memberikan kemungkinan untuk melakukan impor tekstil.

Kebijakan moneter ini memaksa para pengusaha untuk memproduksi 20 sampai 30 persen dari kapasitas tenunnya dan tak hanya itu tetapi peraturan oktober itu juga menjadi masalah besar bagi produsen tekstil dalam negeri karena mereka tidak mampu bersaing dengan impor tekstil yang lebih murah, yaitu 50 persen lebih murah dibanding dengan tekstil buatan Majalaya, sehingga pada akhir Maret tahun 1967 sekitar 70 sampai 80 persen penenun listrik di Majalaya harus berhenti berproduksi ditambah lagi dengan biaya produksi yang mulai meningkat karena

⁹⁰ Wawancara dengan Didi Restiandi, wiraswasta 13 Juni 2023.

harga barang dan jasa yang naik. Terlepas dari masalah yang telah terjadi, pada pertengahan 1967 beberapa penenun rumahan justru kembali berproduksi dengan menggunakan alat tenun bukan mesin yang berjumlah 10.000 dan sebanyak 216 perusahaan kembali berproduksi dengan mengoperasikan 5.554 alat tenun.

Perusahaan yang beroperasi tersebut diantaranya adalah 143 perusahaan skala kecil, 46 perusahaan skala menengah dan 17 perusahaan skala besar, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut hanya bisa memproduksi 50 sampai 60 persen dari kapasitas normalnya. Peristiwa yang terjadi di pertengahan tahun 1967 ini menjadi tanda bahwa pasokan benang tidak lagi menjadi masalah besar untuk melakukan produksi dan di pertengahan tahun 1968 industri tekstil menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan perubahan struktural dan kota Majalaya sendiri telah kembali mendapatkan jati dirinya yang sempat hilang kurang lebih satu setengah tahun yaitu sebagai kota manufaktur tekstil, karena sekitar 50 persen mesin-mesin di pabrik Majalaya kembali berjalan begitu juga dengan alat tenun dan tidak hanya itu tetapi Majalaya dan Bandung juga telah kembali merebut posisinya di pasar tekstil⁹¹.

Pemulihan dan perubahan struktural dari industri tekstil ini kemudian diperjelas dengan adanya Repelita tahun 1969 sampai dengan tahun 1973, dalam program ini, pemerintah menjelaskan tentang rehabilitasi industri yaitu salah satunya dengan memodernisasi industri. Modernisasi industri sektor tenun adalah penggantian alat tenun dan meningkatkan ukuran rata-rata pabrik. Tetapi, pada akhir tahun 1968 yaitu sebelum modernisasi industri menjadi kebijakan resmi

⁹¹ Keppy, *op.cit.*, page. 221.

pemerintah, para pejabat pemerintah menyatakan kekecewaan kepada para pengusaha tekstil Majalaya dikarenakan oleh kurangnya kerjasama diantara para pengusaha tekstil tersebut dan tentunya hal itu menyebabkan kemandekan dalam hal menerapkan repelita dan penanaman modal. Kurangnya kerjasama antara para pengusaha tekstil disebabkan oleh kurangnya kepercayaan anggota terhadap para pemimpin dan sampai akhirnya rehabilitasi industri berhasil diperkenalkan kepada para industrialis pada tahun 1970 dengan konsep penggabungan perusahaan.

Penggabungan perusahaan yaitu menggabungkan para penenun tangan dengan perusahaan skala kecil dan menengah dengan maksud untuk menyatukan modal agar mampu membiayai perusahaan tenun modern atau pemintalan dan *finishing* skala besar. Penggabungan perusahaan ini walaupun sudah dikenalkan di Majalaya tetapi masih belum mampu diwujudkan untuk beberapa pihak karena kelemahan tenun listrik di Majalaya ditambah lagi dengan kondisi majalaya yang padat penduduk dan hal itu kecil kemungkinan untuk terjadinya perluasan pabrik dan yang kedua para penenun menganggap bahwa menenun sebagai kegiatan produksi yang sudah cukup menguntungkan jadi tidak perlu adanya penggabungan perusahaan untuk mendirikan pabrik pemintalan atau pabrik tenun modern. Penggabungan perusahaan ini ditanggapi berbeda oleh beberapa pengusaha pribumi Majalaya yaitu mereka setuju dan sepakat untuk menggabungkan perusahaannya pada tahun 1970 sampai 1971 yaitu dengan membentuk tujuh klaster yang kemudian bersatu membentuk yang namanya sindikat Majalaya baru. Modernisasi industri ini memperjelas bahwa industri tenun rumahan semakin redup dan semakin terpinggirkan.

Inggrid Palmer dan Lance Castle menjelaskan tentang perkembangan industri tekstil di Kecamatan Majalaya yaitu dengan menampilkan data pertumbuhan yang menunjukkan jumlah mesin tenun ATBM dan ATM dari tahun 1930-1960 sebagai berikut,

Table 3.1 List Tenun di Majalaya Pada Tahun 1930-1969

Tahun	ATBM	ATM
1930	257	44
1935	3.915	414
1940	44.000	8.000
1950	71.997	11.390
1955	78.857	12.697
1957	111.522	15.301
1960	150.000	16.896
1962	223.905	22.171
1967	n.a	26.537
1969	280.000	27.000

Sumber: Ahmad Martunis. 2012. "Industri Tekstil Di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 1970-2009". Skripsi. Surakarta: Universitas sebelas Maret Surakarta, hlm. 54.⁹²

Perkembangan tekstil di Kecamatan Majalaya juga ditunjukkan dengan melihat perkembangan daerah pemasaran dan produk-produk tekstil di Kecamatan Majalaya yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 3.2 Daerah pemasaran dan produk tekstil Majalaya tahun 1930-1969

No	Tahun	Daerah Pemasaran	Jenis Produk Tekstil
1	1930-1959	Pasar majalaya, garut, dan bandung	Kain sarung, kain putihan dan kain Kasur
2	1960-1969	Pasar majalaya, garut, bandung dan jakarta	Kain sarung, kain putihan, kain Kasur, kain lap, kain belacu dan handuk

Sumber: Ahmad Martunis. 2012. "Industri Tekstil Di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 1970-2009". Skripsi. Surakarta: Universitas sebelas Maret Surakarta, hlm. 54⁹³.

⁹² Martunis, *op.cit.*, hlm. 54.

⁹³ Ibid., hlm. 55; Wawancara dengan Didi Restiandi dan Ejang, wiraswasta 13 Juni 2023.